# ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA TEGAL TAHUN 2018-2023

**SKRIPSI**

Oleh :

# FIRDA DWI AMALIA SAFITRI NPM: 4320600126

Diajukan Kepada :

# PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

**2024**

# ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI, PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA TEGAL TAHUN 2018-2023

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyararatan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

# FIRDA DWI AMALIA SAFITRI NPM: 4320600126

Diajukan Kepada :

# PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

**2024**





# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MOTTO :**

“Memulai dengan penuh keyakinan, Menjalankan dengan penuh keikhlasan, Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

# PERSEMBAHAN :

Dengan mengucap rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini akan saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya tercinta yang merupakan sosok di balik perjuangan saya hingga bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya.
3. Almamater tercinta Universitas Pancasakti Tegal
4. Kepada Afnika, Rizqoh dan Intan yang selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurnya saya memiliki kalian dalam hidup saya. Terima kasih telah memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi temanku.
5. Arib Naufal Muzakki, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah saya, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. *Last but not least, I wanna thank me . I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work , I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

iv



# ABSTRAK

**Firda Dwi Amalia Safitri, 2024, Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Restoran, Pajak Reklame serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Tahun 2018-2023**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar efektivitas, efisiensi serta kontribusi pajak restoran dan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tegal. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama pendanaan pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis triangulasi. Hasil menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak reklame memiliki tingkat efektivitas yang sangat baik dengan rata-rata efektivitas masing-masing sebesar 106% dan 104%. Tingkat efisiensi pengumpulan pajak sangat tinggi dengan efisiensi 0%, menunjukkan tidak adanya biaya pemungutan yang signifikan. Namun, kontribusi pajak restoran dan pajak reklame pada PAD masih rendah, masing-masing sebesar 6% dan 2%.

**Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Kontribusi,**

**Pendapatan Asli Daerah**

vi

***ABSTRACT***

***Firda Dwi Amalia Safitri, 2024, Analysis of Effectiveness and Efficiency of Restaurant Tax, Billboard Tax and Its Contribution to Local Revenue in Tegal City in 2018-2023.***

*The purpose of this study was to determine the effectiveness, efficiency and contribution of restaurant tax and billboard tax to increase local revenue in Tegal City. Local revenue is one of the main sources of funding for regional development. This research used a qualitative approach with triangulation analysis techniques. The results showed that restaurant tax and billboard tax had a very good level of effectiveness with an average effectiveness of 106% and 104% respectively. The efficiency level of tax collection is very high with 0% efficiency, indicating no significant collection costs. However, the contribution of restaurant tax and billboard tax to PAD is still low, at 6% and 2% respectively.*

***Keywords: Effectiveness, Efficiency, Restaurant Tax, Billboard Tax,***

***Contribution, Regional Original Revenue***

vii

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia – Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Restoran, Pajak Reklame Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Tegal Tahun 2018-2023”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas pancasakti Tegal.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi penelitian untuk skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdulloh Mubarok, S.E., M.M., Ak., C.A, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M, selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
4. Yanti Puji Astutie, S.E., M.Si., CMA, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi penulis.

viii

1. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian.
2. Orang tua, saudara, teman dekat dan pihak-pihak yang sudah membantu, saya ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 10 Juli 2024

Firda Dwi Amalia Safitri

ix

# DAFTAR ISI

**Halaman**

[HALAMAN JUDUL i](#_bookmark0)

HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN ii

[PENGESAHAN SKRIPSI iii](#_bookmark1)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv](#_bookmark2)

[PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKAS v](#_bookmark3)

[ABSTRAK vi](#_bookmark4)

[KATA PENGANTAR viii](#_bookmark5)

[DAFTAR ISI x](#_bookmark6)

[DAFTAR TABEL xii](#_bookmark7)

[DAFTAR GAMBAR xiii](#_bookmark8)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_bookmark9)

* 1. [Latar Belakang Masalah 1](#_bookmark10)
	2. [Rumusan Masalah 8](#_bookmark14)
	3. [Tujuan Penelitian 8](#_bookmark15)
	4. [Manfaat Penelitian 9](#_bookmark16)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11](#_bookmark17)

1. [Landasan Teori 11](#_bookmark18)
	1. [Pengertian Pajak 11](#_bookmark19)
	2. [Fungsi Pajak 12](#_bookmark20)
	3. [Jenis-Jenis Pajak 12](#_bookmark21)
	4. [Sistem Pemungutan Pajak 17](#_bookmark22)
	5. [Pendapatan Asli Daerah 19](#_bookmark23)
	6. [Pajak Restoran 21](#_bookmark24)
	7. [Pajak Reklame 22](#_bookmark25)

x

* 1. [Efektivitas 23](#_bookmark26)
	2. [Efisiensi 24](#_bookmark27)
	3. [Definisi dan Pengukuran Kontribusi 24](#_bookmark28)
1. [Studi Penelitian Terdahulu 26](#_bookmark30)
2. [Kerangka Pemikiran Konseptual 30](#_bookmark32)

[BAB III METODE PENELITIAN 33](#_bookmark34)

1. [Jenis Penelitian 33](#_bookmark35)
2. [Subjek Penelitian 33](#_bookmark36)
3. [Metode pengumpulan Data 34](#_bookmark37)
4. [Metode Analisis Data 36](#_bookmark38)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

1. Gambaran Umum 42
2. Hasil Penelitian 47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 67

1. Kesimpulan 67
2. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

LAMPIRAN 75

xi

# DAFTAR TABEL

**Tabel Halaman**

[Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Tegal tahun 2018-2023 4](#_bookmark11)

[Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Tegal tahun 2018-2023 6](#_bookmark12)

[Tabel 1.3 Target dan Realisasi PAD Kota Tegal 2018-2023 6](#_bookmark13)

[Tabel 2.1 Kriteria Klasifikasi Kontribusi 25](#_bookmark29)

[Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu 28](#_bookmark31)

[Tabel 3.1 Kriteria Pengambil Keputusan Efisiensi 38](#_bookmark39)

Tabel 4.1 Efektivitas Pajak Restoran Kota Tegal Tahun 2018-2023 48

Tabel 4.2 Efektivitas Pajak Reklame Kota Tegal 2018-2023 50

Tabel 4.3 Efisiensi Pajak Restoran Kota Tegal Tahun 2018-2023 51

Tabel 4.4 Efisiensi Pajak Reklame di Kota Tegal Tahun 2018-2023 54

Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Tegal Tahun 2018-2023 56

Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Tegal Tahun 2018-2023

............................................................................................................................... 57

xii

# Gambar Halaman

[Gambar 2.1 Kerangka Pikir 31](#_bookmark33)

Gambar 4.1 Kota Tegal 42

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Tegal 47

xiii

# Lampiran Halaman

LAMPIRAN 1. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 75

LAMPIRAN 2. JAWABAN/ULASAN PERTANYAAN WAWANCARA 1 79

LAMPIRAN 3. JAWABAN/ULASAN PERTANYAAN WAWANCARA 2 83

LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI WAWANCARA 87

LAMPIRAN 5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tegal Tahun 2018-2023 88

LAMPIRAN 6. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran KotaTegal Tahun 2018-2023 88

LAMPIRAN 7. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame KotaTegal Tahun 2018-2023 88

LAMPIRAN 8. Rekap Data Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018 89

LAMPIRAN 9. Rekap Data Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019 89

LAMPIRAN 10. Rekap Data Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2020 90

LAMPIRAN 11. Rekap Data Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2021 91

LAMPIRAN 12. Rekap Data Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 92

LAMPIRAN 13. Rekap Data Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 93

LAMPIRAN 14. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal Tahun 2018 93

LAMPIRAN 15. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal Tahun 2019 94

LAMPIRAN 16. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal Tahun 2020 94

LAMPIRAN 17. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal Tahun 2021 95

LAMPIRAN 18. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal Tahun 2022 95

LAMPIRAN 19. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal Tahun 2023 96

xiv

# BAB I PENDAHULUAN

# Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah adalah bentuk desentralisasi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah secara resmi diberlakukan pada tahun 2001 dan menekankan bahwa kekuatan utama berada di kota atau kabupaten, bukan di provinsi (Asti Mutiara, 2020). Substansi otonomi daerah pada era ini, daerah memperoleh manfaat dari peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dicapai dengan mempersingkat rantai kendali pemerintahan, sehingga setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Indonesia adalah negara berkembang, dimana pajak memegang peranan penting dalam perekonomian. Pajak menjadi inti perekonomian di Indonesia karena memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintahan. Karena kontribusi pajak yang besar, pemerintah berupaya maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor ini. Langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan pembaruan atau reformasi pajak (Fitriani et al., 2019).

Menurut Amin & Yunita (2022) dengan diterapkanya otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta berbagai perubahannya, muncul tanggapan yang berbeda dari daerah. Diantaranya, kebebasan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

1

pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan beberapa daerah berhasil meningkatkan PAD mereka. Oleh karena itu, setiap daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan sumber pendapatannya, yang kemudian dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah yang dikelola. Penekanan pada peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pajak daerah yang termasuk dalam PAD (Setiawan & Gayatrie, 2018).

Pengukuran efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah sangat penting untuk mengetahui apakah ada peningkatan dalam pengelolaan pajak daerah. Pajak daerah menjadi topik menarik untuk diteliti karena merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai administrasi dan pembangunan daerah, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Septiawan, 2021). Untuk memaksimalkan penerimaan daerah perlu terus menggali dan mencari sumber pendapatan baru, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan sumber daya yang terbatas, sambil memaksimalkan efektivitas aktivitas yang sudah ada. Upaya peningkatan PAD harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam sistem pemerintahan daerah yang ada (Jasandy, 2022).

Selain itu, budaya konsumerisme semakin populer di Indonesia. Salah satunya adalah konsumsi makanan, di mana orang lebih suka makanan cepat saji atau *fast food* daripada makanan yang diproses, karena orang percaya bahwa makanan cepat saji lebih menghemat waktu dan juga dianggap lebih

modis dan kontemporer. Pengusaha makanan berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi makanan yang menarik dan sesuai dengan selera masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pelaku usaha yang terlibat dalam peningkatan jumlah tempat makan seperti restoran, rumah makan, dan kafe. Banyaknya pengusaha makanan dan omzetnya yang relatif tinggi secara tidak langsung berkontribusi pada pembangunan daerah Indonesia (Setiawan & Gayatrie, 2018).

Tegal memiliki banyak kekayaan, salah satunya adalah kuliner khasnya. Kota ini memiliki banyak makanan enak dan lezat, dan memiliki potensi besar untuk menjadi tempat wisata kuliner. Jumlah pengusaha makanan yang meningkat di Kota Tegal mendorong mereka untuk berlomba-lomba mendirikan bisnis makanan mereka sendiri untuk memenuhi permintaan masyarakat sekitar sehingga usaha tersebut dapat berkembang lebih cepat dan berkontribusi pada pendapatan daerah dari pajak,serta meningkatkan PAD Kota Tegal. Salah satu bentuk pengelolaan pajak daerah oleh Pemerintahan Kota Tegal adalah Pajak Restoran, yang memiliki potensi besar untuk memaksimalkan PAD Kota Tegal. Kota Tegal memiliki sekitar 631 restoran dan juga memperoleh pendapatan dari pajak reklame, karena semakin banyak perusahaan dan individu menggunakan media reklame untuk mempromosikan bisnis dan produk mereka. Begitu pula dengan pengusaha tempat makan seperti restoran, rumah makan, dan kafe yang akan dikenakan pajak pada tempat usaha mereka (Setiawan & Gayatrie, 2018).

Efektivitas merupakan ukuran sejauh mana sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan tertentu. Jika organisasi mampu mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dapat dianggap berjalan secara efektif. Indikator efektivitas memberikan gambaran mengenai dampat dan hasil dari keluaran program dalam mencapai tujuannya. Jika efektivitas pemungutan pajak restoran dan pajak reklame meningkat, maka Pemda Kota Tegal dianggap efektif dalam pemungutan pajaknya. Sebaliknya, jika efektivitas pemungutan pajak restoran dan pajak reklame menurun, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pemungutan pajak belum optimal.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pertumbuhan target dan realisasi Pajak Restoran, Pajak Reklame, serta PAD Kota Tegal dari tahun 2018 hingga 2023, dapat dilihat dari tabel berikut:

# Tabel 1.1

**Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Tegal tahun 2018-2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Pajak Restoran (Rp)** | **Realisasi Pajak Restoran (Rp)** |
| 2018 | 13.000.000.000 | 15.326.098.629 |
| 2019 | 17.000.000.000 | 18.322.477.941 |
| 2020 | 13.050.000.000 | 14.174.483.422 |
| 2021 | 15.357.000.000 | 16.726.181.892 |
| 2022 | 25.591.000.000 | 22.961.948.106 |
| 2023 | 25.500.000.000 | 26.697.934.818 |

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, 2023

Pada tahun 2018, target pajak restoran sebesar Rp 13.000.000.000 berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai Rp 15.326.098.629. tahun 2019 menunjukkan pencapaian yang lebih baik lagi, dengan realisasi Rp 18.322.477.941 melebihi target sebesar Rp 17.000.000.000. namun, pada tahun 2020, meskipun target pajak restoran diturunkan menjadi Rp 13.050.000.000,

realisasi meningkat menjadi Rp 14.174.483.422. tahun 2021 juga menunjukkan hasil positif, dengan realisasi pajak sebesar Rp 16.726.181.892, melebihi target Rp 15.357.000.000. di tahun 2022, meskipun target pajak restoran meningkat menjadi Rp 25.591.000.000, realisasi pajak berada di bawah target, yaitu Rp 22.961.948.106. namun, pada tahun 2023, realisasi pajak restoran kembali melampaui target Rp 25.500.000.000 dengan pencapaian sebesar Rp. 26.697.934.818.

Hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa realisasi pajak restoran seringkali melebihi target yang ditetapkan, dengan pengecualian pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya variasi dalam pencapaian target, yang disebabkan oleh gagasan bahwa membeli makanan dan minuman cepat saji lebih efektif dalam menghemat waktu dan juga dianggap lebih gaya dan kontemporer. Dengan adanya hal ini, pengusaha di bidang makanan dan minuman berlomba-lomba untuk membuat kreasi makanan dan minuman yang menarik dan sesuai dengan selera masyarakat. Tidak diragukan lagi, peningkatan jumlah bisnis di bidang ini telah mendorong peningkatan jumlah restoran, rumah makan, dan kafe.

Dibandingkan dengan pendapatan pajak restoran yang terus meningkat setiap tahun, pajak reklame juga menunjukkan kenaikan yang konsisten. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah pengelolaan pajak restoran dan pajak reklame di Kota Tegal sudah efisien, efektif dan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak reklame dari tahun 2018 hingga 2023 mengalami peningkatan yang signifikan.

# Tabel 1.2

**Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Tegal tahun 2018-2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target Pajak Reklame (Rp)** | **Realisasi Pajak Reklame****(Rp)** |
| 2018 | 4.112.000.000 | 4.421.113.106 |
| 2019 | 4.400.000.000 | 5.214.117.600 |
| 2020 | 4.700.000.000 | 5.092.586.500 |
| 2021 | 6.583.000.000 | 7.096.106.000 |
| 2022 | 8.330.000.000 | 7.842.758.000 |
| 2023 | 10.625.750.000 | 9.072.604.445 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, 2023

# Tabel 1.3

**Target dan Realisasi PAD Kota Tegal 2018-2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Target PAD (Rp)** | **Realisasi PAD (Rp)** |
| 2018 | 305.484.446.000 | 275.021.448.594 |
| 2019 | 306.557.626.000 | 285.575.788.984 |
| 2020 | 276.449.199.000 | 266.580.982.102 |
| 2021 | 317.488.238.500 | 308.116.840.289 |
| 2022 | 381.994.269.000 | 340.054.969.233 |
| 2023 | 416.655.985.729 | 336.842.425.515 |

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, 2023

Pada tabel 1.3 menunjukan bahwa realisasi PAD Kota Tegal dari tahun 2018 hingga 2023 umumnya berada di bawah terget yang ditetapkan, meskipun ada tren peningkatan dalam beberapa tahun, dengan terget dan realisasi PAD tertinggi tercatat pada tahun 2023, meskipun realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Pajak restoran dan pajak reklame sering menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD. Masalah yang umum ditemui dalam sektor pajak reklame meliputi reklame yang dipasang tanpa izin dari pemerintah kota, reklame dengan izin yang sudah kadaluarsa, reklame ilegal, reklame yang tidak sesuai dengan lokasi dan standar keamanan, serta reklame yang tidak membayar pajak. Jika masalah-masalah ini tidak ditangani, mereka dapat menurunkan efektivitas, efisiensi dan kontribusi

pajak reklame terhadap PAD dan tata ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dari pemerintah dalam penertibahn dan pengawasan reklame serta kesadaran dari penyelenggara reklame untuk meningkatkan pembayaran pajak.

Sedangkan masalah utama dalam sektor pajak restoran adalah beban pajak yang sering kali masih ditanggung oleh pengusaha, meskipun seharusnya subjek pajak restoran adalah individu atau entitas yang membeli makanan dan minuman di restoran. Dengan kata lain, pajak restoran seharusnya menjadi tanggung jawab pembeli (Yuniati & Yuliandi, 2021).

Beberapa penelitian tentang pendapatan asli daerah sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu seperti Yuniati & Yuliand (2021) menemukan bahwa efektivitas pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor sangat baik, tetapi kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD masih belum memadai. Pratiwi (2016) melaporkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak parkir di Kota Tengerang selama tahun 2010-2014 sangat baik, namun kontribusi rata-rata dari pajak- pajak tersebut masih tergolong rendah. Rahmatika (2021) menyatakan bahwa efektivitas pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame sangat efektif namun kontribusi rata-ratanya masih kurang memadai. Astuti (2020) menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Bengkulu sudah efektif dan efisien. Sementara itu, Ariyani(2020) menemukan bahwa efektivitas pajak reklame sangat baik, tetapi kontribusinta masih tergolong sangat rendah dengan rasio kontribusi di bawah 10%.

Oleh karena itu, maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Efektivitas Dan Efisiensi, Pajak Restoran, Pajak Reklame serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tegal Tahun 2018-2023”**. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar efektivitas, efisiensi serta kontribusi pajak restoran dan pajak reklame terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Tegal.

# Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

* + 1. Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran dan pajak reklame pada pendapatan asli daerah Kota Tegal dari tahun 2018 sampai dengan 2023?
		2. Bagaimana tingkat efisiensi biaya pemungutan pajak restoran dan pajak reklame pada pendapatan asli daerah di Kota Tegal dari tahun 2018 sampai dengan 2023?
		3. Bagaimana kontribusi pajak restoran dan pajak reklame pada pendapatan asli daerah Kota Tegal dari tahun 2018 sampai dengan 2023?

# Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu antara lain:

* + 1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak restoran dan pajak reklame pada pendapatan asli daerah Kota Tegal dari tahun 2018 sampai dengan 2023.
		2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi biaya pemungutan pajak restoran dan pajak reklame pada pendapatan asli daerah di Kota Tegal dari tahun 2018 sampai dengan 2023.
		3. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran dan pajak reklame pada pendapatan asli daerah Kota Tegal dari tahun 2018 sampai dengan 2023.

# Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi:

* + 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai pajak restoran dan pajak reklame di Kota Tegal. Selain itu, diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang pajak restoran dan pajak reklame.

* + 1. Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

* + - 1. Bagi Penulis

Bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tegal.

* + - 1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberilakan ilmu pengetahuan, wawasan, referensi, dan menambahi kepustakaan sehingga dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Sementara itu, bagi dinas pemerintahan, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan dan dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijakan di masa depan.

* + - 1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan serta memberikan manfaat sebagai informasi bagi para pengguna dan juga bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

# Landasan Teori

# Pengertian Pajak

Pajak menurut Soemitro (dalam Nurmantu (2021)) merupakan kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada kas negara, yang merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Mulyadi (2010) pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau entitas berdasarkan undang- undang yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung. Pajak tersebut digunakan untuk kepentingan negara dengan tujuan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan menurut Andriani (dalam Nurmantu (2021)) pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa, sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban pembahyaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum sesuai dengan undang-undang.

11

# Fungsi Pajak

Menurut Nurmantu (2021) pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu:

* + 1. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Fungsi *Budgeter*, yang dikenal sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), adalah peran pajak dalam mengumpulkan dana secara efektif ke kas negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi ini dianggap utama karena merupakan fungsi pajak yang pertama kali muncul dalam sejarah. Melalui fungsi ini, pemerintah memungut pajak dari masyarakat untuk membiayai berbagai kepentingan.

* + 1. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulerend*)

Fungsi *regulerend*, yang juga dikenal sebagai fungsi tambahan, adalah peran pajak yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Fungsi ini disebut tambahan karena melengkapi fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgeter*. Untuk mencapai tujuan tersebut, pajak dijadikan alat kebijakan, contohnya pemerintah dapat mengenakan pajak tinggi pada minuman keras untuk mengurangi konsumsi di kalangan generasi muda, sehingga harga minuman tersebut menjadi tidak terjangkau bagi mereka.

# Jenis-Jenis Pajak

Menurut Phaureulla dan Erny (2018) terdapat berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat

dikelompokkan berdasarkan sifat, instasi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

* + 1. Jenis pajak berdasarkan sifat

Salah satu penggolongan yang paling terkenal dalam perpajakan adalah pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Untuk membedakan kedua jenis pajak ini dikenal dua pendekatan, yaitu pendekatan secara ekonomis dan pendekatan secara administratif atau yuridis.

* + - 1. Pendekatan secara ekonomis

Dalam membedakan pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dari pendekatan secara ekonomis, perlu terlebih dahulu memahami istilah tax burden, tax shifting, tax incidence dan destinataris. Tax burden atau beban pajak secara metapora adalah beban yang dipikul di atas bahu seseorang. Tax shifting adalah proses pelimpahan beban tersebut dari satu orang ke orang lain, dari satu pihak ke pihak lainnya. Tax incidence adalah akibat keterkenaan pelimpahan beban tersebut. Destinataris adalah orang atau pihak yang memang dituju oleh Undang- undang Perpajakan untuk memikul beban tersebut.

Suatu pajak disebut pajak langsung apabila:

* + - * 1. Beban pajaknya (tax burden) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau pihak ketiga.
				2. Pajak tidak bisa menaikkan harga, contohnya Pajak Penghasilan.

Sebaliknya, suatu pajak disebut pajak tidak langsung apabila:

Beban pajaknya dapat dilimpahkan baik seluruh maupun sebagiannya kepada pihak lain atau pihak ketiga.

Pajak dapat menaikkan harga. Contoh: Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai.

* + - 1. Pendekatan secara administratif atau yuridis

Kriteria pertama adalah periodisasi pemungutan. Jika suatu pajak dipungut secara periodik, misalnya sekali dalam setahun maka pajak tersebut termasuk dalam Pajak Langsung. Contohnya, Pajak Penghasilan di Indonesia terutang sekali dalam satu tahun. Demikian juga dengan Pajak Pendapatan dan Pajak Kekayaan yang pernah berlaku di Indonesia, terutang satu kali satu tahun. Sebaliknya, jika pemungutan sesuatu pajak tidak mengenal periodisasi, misalnya hanya dipungut apabila terjadi peristiwa yang dapat menyebabkan dikenakannya pajak maka pajak tersebut termasuk dalam Pajak Tidak Langsung, contohnya Pajak Pertambahan Nilai.

Kriteria kedua adalah ada atau tidaknya Kohir. Pajak Langsung mempunyai kohir, contohnya Pajak Pendapatan 1944, Pajak Penghasilan 1984, sedangkan Pajak Tidak Langsung tidak mempunyai kohir, misalnya Pajak Penjualan 1951. Kohir pada

hakikatnya adalah tembusan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yakni berupa penatausahaan identitas wajib pajak, jumlah pajak yang harus dinbayar, tahun pajak, tanggal pembayaran dan sebagainya.

* + 1. Jenis pajak berdasarkan instasi pemungut

Berdasarkan instasi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

* + - 1. Pajak daerah (lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran dan masih banyak lainnya.

* + - 1. Pajak negara (pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instasi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang terbesar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

* + 1. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif.

* + - 1. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dalam pengenaanyta hanya memperhatikan sifat objektifnya. Jadi, pemungutannya tidak berdasarkan wajib pajak. Pajak objektif dipungut karena perbuatan, keadaan, atau kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara, dengan tidak mengidahkan tempat kediamanya atau sifat subjek (baik individu atau badan/instasi maupun warga negara atau tidak). Misalnya pajak tontonan.

* + - 1. Pajak subjektif

Pajak subjektif atau pajak yang bersifat perorangan adalah pajak yang dalam penggunaanya memperhatikan keadaan-keadaan pribadi wajib pajak. Akibatnya, dapat terjadi pemungutan pajak terhadap orang-orang yang mempunyai jumlah penghasilan yang sama tetapi pajak yang dipungut dari mereka tidaklah sama. Hal ini disebabkan oleh keadaan masing-masing wajib pajak yang tidak sama dalam penentuan penghasilan tidak kena pajak. Golongan pajak subjektif adalah pajak pendapatan atas penduduk Indonesia dan pajak kekayaan atas penduduk Indonesia, serta pajak yang dipungut dari badan-badan. Contoh: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP),

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

# Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. Stelsel nyata *(riel stelsel)*

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutanya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Akibatnya, pemungutan pajak baru bisa dilakukan pada awal periode berikutnya. Dengan kata lain, pemerintah dapat memperoleh uang pajak, namun harus menunggu sampai akhir tahun. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sementara itu, kelemahanya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

1. Stelel Anggapan (*fictie stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama

dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sementara itu, kelemahannya adalah apabila perkembangan ekonomi meningkat maka pajak dipungut terlambat. Perkiraan pajak yang dipungut selalu lebih rendah daripada penghasilan yang sebenarnya. Demikian juga sebaliknya, jika dalam keadaan ekonomi yang menurun maka pajak yang dipungut selalu lebih besar ketimbang keadaan yang sebenarnya.

1. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggaran maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

Kebaikan stelsel ini adalah pemerintah dapat memperoleh uang pajak di awal tahun pajak sehingga pembiayaan yang dibutuhkan negara tidak terhambat begitupun bagi Wajib Pajak meskipun bayar diawal tahun pajak, namun akan mendapat koreksi di akhir tahun pajak untuk disesuaikan dengan penghasilan nyata. Sementara itu,

kelemahnya adalah kurang efisien kalau ditinjau dari segi biaya. Sebab, pada akhir tahun DJP harus membuat surat ketetapan pajak sekali lagi sehingga biayanya bertambah besar.

# Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainya yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kebabasan bagi daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dari asas desentralisasi. Sedangkan pengertian PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat diketahui seberapa jauh suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan (Agustini, 2021).

Menurut Halim (2020) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena menunjukkan seberapa banyak suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu:

* + 1. Hasil pajak daerah merupakan salah satu bentuk pendapatan asli daerah. Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintahan yang mana bersifat memaksa. Menurut UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuaran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah.
		2. Hasil retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh derah baik langsung maupun tidak langsung.
		3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaa daerah

lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

* + 1. Lain-lain PAD yang sah meliputi yaitu:
			1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
			2. Jasa giro;
			3. Penjualan asset tetap daerah;
			4. Pendapatan bunga;
			5. Keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing;
			6. Komisi, potongan dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah;
			7. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
			8. Pendapatan denda pajak;
			9. Pendapatan denda retribusi;
			10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

# Pajak Restoran

Menurut Kamaroellah (2021) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak di restoran di Indonesia saat ini di dasarkan pada Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran, termasuk *cafe, bar* dan sejenisnya. Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran/rumah makan dikenakan pajak. Beberapa

pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: pelayanan usaha jasa boga atau catering dan pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredaranya tidak memiliki batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah, yaitu tidak melebihi Rp.

30.000.000 per tahun. Pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaanya melakukan usaha dibidang rumah makan. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak, sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

# Pajak Reklame

Menurut Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun (2011) tentang pajak daerah. Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh reklame yang dirancang untuk tujuan komersial. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada dinas pendapatan daerah kabupaten/kota, meliputi: reklame papan/*billboard*; reklame megatron/videotron/*large electronic display* (LED); reklame kain; reklame melekat (stiker); reklame selebaran; reklame berjalan;

reklame udara; reklame suara; reklame film/slide; reklame peragaan. Pada pajak reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu: a) penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan; warta bulanan; dan sejenisnya. b) penyelenggara reklame lainnta yang ditetapkan dengan peraturan daerah, misalnya penyelenggara reklame yang diadakan khusus kegiatan sosial, Pendidikan, keagamaan dan politik tanpa sponsor.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan atau melakukan pemesanan reklame. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggaran reklame. Jika reklame diselenggaran langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, wajb pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tertentu. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga. Misalnya, Perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut manjadi wajib pajak reklame ( Kamaroellah 2021).

# Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009) merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Efektivitas dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga mampu untuk menganalisis serta

mengambil langkah untuk kedepannya. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu dengan rusmus sebagai berikut:

Rumus Efektivitas =

Realisasi Penerimaan Pajak

Terget Penerimaan Pajak

x100%

# Efisiensi

Efisiensi menurut Mardiasmo (2009) berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Efisiensi juga menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatam yang diterima. Semakin kecil tingkat efisiensi menggambarkan tingkat suati kinerja semakin baik. Dari perhitungan tersebut kemudian dilakukan interpretasi dengan menggunakan kriteria efisiensi pajak. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*), dengan rumus sebagai berikut:

Efisiensi =

Biaya Pemungutan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak

x100%

# Definisi dan Pengukuran Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak restoran dan pajak reklame terhadap besarnya pendapatan asli daerah. Analisis kontribusi pajak

daerah adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap PAD, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD (Mia & Jouzar, 2019).

Rumus kontribusi untuk pajak daerah seperti pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

Pa =

QXn

QZn

x100%

Dimana:

Pa: sumbangan pajak daerah (pajak restoran dan pajak reklame)terhadap Pendapatan Asli Daerah

QX: besaran pajak daerah (pajak restoran dan pajak reklame)

QZ: besaran Pendapatan Asli Daerah n: tahun (periode tertentu)

Disamping itu ada kriteria klasifikasi kontribusi untuk mengukur bagaimana kedua sumber PAD berkontribusi terhadap PAD.

# Tabel 2.1

**Kriteria Klasifikasi Kontribusi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Presentase** | **Kriteria** |
| 0-10 | Sangat Kurang |
| 11-20 | Kurang |
| 21-30 | Sedang |
| 31-40 | Cukup Sedang |
| 41-50 | Baik |
| Diatas 50 | Sangat Baik |

Sumber: Depdagri, Kempmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Amiruddin, 2022)

# Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul “Analisa Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Depok” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas, kontribusi dan tingkat proyeksi pemungutan pajak lampu jalan dan pajak reklame di PAD Kota Depok. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif untuk menganalisis data target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas dan kontribusi, serta metode kuadrat terkecil dan persamaan trend garis lurus, dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektiitas pajak penerangan jalan tahun 2014-2018 adalah sebesar 105,15%. Ini dapat diklasifikasikan sebagai sangat efektif. Rata-rata tingkat efektivitas pajak reklame sebesar 103,46%. Ini memenuhi kriteria sangat efektif. Rata-rata tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD tahun 2014-2018 adalah sebesar 1,16%. Ini memenuhi kriteria sangat rendah. Prediksi penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak reklame tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Prediksi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2019-2023 mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp 6.338.339.828,60 setiap tahunnya. Prediksi penerimaan pajak reklame tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar Rp 904.559.465,60 (Apriwarto, 2022).

Penelitian yang berjudul “Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018)” penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode sekunder, observasi, dan studi Pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.0 yaitu analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda, uji hipotesis uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dan untuk pajak reklame berpengaruh secara singnifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (Musdalifah, 2020).

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoharjo, Malang Dan Batu Tahun 2011- 2020”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan datanya metode sekunder. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Model PLS adalah model pengukuran *(outer model)*; validitas *convergent*, validitas *discriminant*, uji reliabilitas, analisis linier berganda, dan model struktural *(Inner Model)*; *Coef icient Determinant of*

(R2), Signifikansi (t-*value*). Hasil studi mengindikasikan bahwasannya secara parsial pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame secara signifikan mempengaruhi PAD. Adapun kesimpulannya yaitu ketiga variabel bebas pada studi ini mempengaruhi PAD pemerintah kabupaten/kota Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Batu ( Veronika & Dyah, 2022).

Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk mengerjakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

# Tabel 2.2

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Peneliti dan Tahun Penelitian** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Nurwani & Damis (2021) | Analisis Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Parepare pada Tahun 2013- 2017 yakni masih mengalami fluktuasi dan efektivitas pajak reklame telah mencapai taerget yang ditetapkan dan masukkriteria sangat baik |
| 2 | Primandari & Dahlia (2020) | Kontribusi dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu periodetahun 2013-2017 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD sangat rendah. Sedangkan efektivitas menunjukkan bahwa pajak reklame terhadap PAD sangatefektif. |
| 3 | Fitriano & Ferina (2021) | Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu | Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran cukup efektif. Sedangkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran termasuk kategori sangat mempunyai kontribusi. |
| 4 | Musdalifah (2020) | Tingkat PenerimaanPajak Hotel, Pajak | Hasil Penelitian menunjukkanbahwa pajak hotel tidak |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018) | berpengaruh secara signifikan. Untuk pajak restoran berpengaruh secara signifikan. Dan untuk pajak reklame berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan aslidaerah |
| 5 | Rizka Ariyani, Singgih Setiawan & Nur Cahyati (2020) | Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli DaerahKabupaten Pekalongan | Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame sangat efektif. Dan kontribusi pajak reklameterhadap PAD sangat kurang |
| 6 | Halomoan Sihombing (2020) | Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Pajak reklame berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD. |
| 7 | Veronika Anggun Prasetyaningtyas & Dyah Ratnawati (2022) | Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoharjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2022 | Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame secara signifikan mempengaruhi PAD. |
| 8 | Yuniati & Yuliandi (2021) | Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor | Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor sudah sangat efektif. Kontribusi pajakreklame dan pajak restoran di Kota Bogor masih kurang baik. |
| 9 | Apriwarto (2022) | Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Depok | Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak penerangan jalan diklasifikasikan sangat efektif sedangkan rata-rata tingkat efektivitas pajak reklame memenuhi kriteria sangat efektif. Dan rata-rata tingkat kontribusi pajak penerangan jalan dan pajak |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | reklame memenuhi kriteriasangat rendah. |
| 10 | Maharani & Murni Sari (2021) | Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar | Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak daerah pada tahun 2016-2020 Kabupaten Blitar sangat efektif. Dan penerimaan pajak daerah masih belum berkontribusi terhadap pendapatam asli daerah Kabupaten Blitar karena masih tergolong dalam kriteriasedang. |
| 11 | Rosa (2020) | Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi | Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektifitas rata-rata pajak daerah dan rasio efisiensi rata-rata pajak daerah kota Bukittinggi tergolong kategori efektif dan efisien. Rasio efektifitas rata-rata retribusi daerah dan rasio efisiensi rata- rata retribusi daerah tergolong sangat efektif dan sangat efisien. Rasio kontribusi rata- rata pajak daerah terhadap PAD tergolong cukup baik dan rasio kontribusi rata-rata retribusi daerah terhadap PAD tergolongsedang. |

# Kerangka Pemikiran Konseptual

Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas, efisiensi pajak restoran dan pajak reklame pada pendapatan asli daerah Kota Tegal. Kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti untuk merumuskan masalah dan menentukan perhitungan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran dan Pajak Reklame

Efektivitas dan Efisiensi

Kontribusi pada PAD

# Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam beberapa tahun terakhir di Kota Tegal penerimaan pajak daerah rata-rata mengalami peningkatan realisasi yang akan berdampak positif pada penerimaan PAD yang pada akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah beberapa diantaranya dari pajak restoran dan pajak reklame. Badan Keuangan Daerah Kota Tegal menghitung target dan realisasi pajak restoran dan pajak reklame apabila target pajak restoran dan pajak reklame dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan realisasi pendapatan restoran dan pajak reklame maka pajak restoran dan pajak reklame tersebut telah efektif pemungutannya.

Pengelolaan pajak restoran dan pajak reklame yang efektif menghasilkan pendapatan pajak yang maksimal dari kedua jenis pajak tersebut, sedangkan analisis efisiensi digunakan untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak restoran dan reklame. Pemungutan yang efektif dan efisien, dengan mengacu pada target dan

meminimalkan biaya, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak restoran dan reklame di Kota Tegal serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pajak daerah, sehingga PAD dapat ditingkatkan dan mampu membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar efektivitas dan efisiensi pajak restoran serta pajak reklame pada PAD di Kota Tegal.

# BAB III METODE PENELITIAN

# Jenis Penelitian

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kualitatif yang ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Terkait dengan jenis penelitian dalam skripsi ini, jika ditinjau dari rancangan penelitian maka dapat digolongkan ke penelitian metode deskriptif dengan menerapkan perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi serta rasio kontribusi. Penelitian ini menghitung analisis evektifitas dan efisiensi, pajak restoran, pajak reklame serta kontribusinya pada PAD, kemudian dari hasil prosentase tersebut, penulis menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis dan logis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang diteliti

# Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Jl.Ki Gede Sebayu No. 5. Informan yang akan menjadi sumber penelitian ini adalah staf bidang Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Subbidang Penetapan oleh Bapak M. Eko Putro Kurniawan, SST.Pa yang berkaitan dengan pajak reklame dan staf bidang Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Subbidang Penagihan oleh Bapak Muhammad Ghozali, S.IP, M.Si yang berkaitan dengan pajak restoran di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Objek dalam penelitian ini bertujuan untuk

33

menganalisis efektivitas penerapan serta efisiensi dalam pengumpulan dan penegakan pajak restoran dan pajak reklame di Kota Tegal, serta mengidentifikasi kontribusi keduanya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal. Penelitian juga akan membandingkan relatif kontribusi antara pajak restoran dan pajak reklame terhadap total PAD Kota Tegal, sambil menganalisis tren pertumbuhan kontribusi keduanya terhadap PAD selama periode 2018-2023.

# Metode pengumpulan Data

Untuk menjelaskan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, diperlukan data dan informasi yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan *(library research)*, dokumentasi, observasi, dan wawancara.

* 1. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Studi Kepustakaan *(Library Research),* yaitu pengumpulan data dengan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diambil. Literatur tersebut dapat berupa buku, Undang-undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, koran, tulisan ilmiah, *World Wide Web* (WWW) dan sejenisnya. Studi kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup analisis teoritis yang komperhensif tentang konsep dan teori yang relavan dengan masalah yang diteliti, serta penelusuran informansi aktual dan terkini mengenai topik tersebut. Selain itu, juga diperlukan evaluasi kritis terhadap sumber-sumber yang ditemukan untuk memastikan keandalan dan

relevansi informasi yang digunakan dalam penelitian. Dengan menggunakan studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks permasalahan yang sedang diteliti.

* 1. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan mengumpulakan informasi dari dokumen-dokumen tertulis seperti catatan, transkip, buku, surat kabar dan sebagainya. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara melihat kemudian menganalisis data-data yang berkaitan dengan penerimaan pajak restoran dan reklame dari penerimaan PAD.

* 1. Observasi

Observasi bertujuan untuk menggali data dari sumber berupa peristiwa, tempat / lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi juga dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Peneliti menggunakan observasi langsung dengan mengamati kejadian/ peristiwa yang terjadi dalam penerimaan dan pemungutan pajak restoran dan reklame di Kota Tegal sehubungan dengan tiga komponen utama, yakni *place* (tempat), *actor* (pelaku), *activities* (aktivitas). Hal ini dilakukan untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

* 1. Wawancara

Wawancara atau dialog dengan staf bidang Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Subbidang Penetapan oleh Bapak M. Eko Putro

Kurniawan, SST.Pa yang berkaitan dengan pajak reklame dan staf bidang Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Subbidang Penagihan oleh Bapak Muhammad Ghozali, S.IP, M.Si yang berkaitan dengan pajak restoran di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

# Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan Trigulasi yaitu dengan mencocokan dan membandingkan data informasi melalui data dan wawancara yang dilakukan. Penelitian ini juga melakukan analisis kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan angka berdasarkan informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti.

* 1. Analisis Tingkat Efektifitas Pajak Restoran dan Pajak Reklame

Untuk bisa menjawab rumusan masalah yang pertama, dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Reklame di Kota Tegal dengan rumus sebagai berikut:

Efektivitas= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑥100%

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung Tingkat Efektivitas dari Pajak Restoran dan Pajak Reklame adalah:

* + 1. Memasukan data realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak reklame dari tahun 2018-2023 ke dalam rumus.
		2. Masukan data target pajak restoran dan pajak reklame tahun 2018-2023 ke dalam rumus.
		3. Menghitung realisasi pajak restoran dan pajak reklame dibagi dengan target pajak restoran dan pajak reklame menggunakan rumus efektivitas.
		4. Memasukan hasil perhitungan tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak reklame dari tahun 2018-2023 ke dalam tabel efektivitas.
		5. Menganalisis dan menarik kesimpulan tingkat efektivitas dengan cara membandingkan antara realisasi tingkat efektivitas dengan kriteria efektivitas.
	1. Analisis Efisiensi Pajak Restoran dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk menganalisis efisiensi dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase:

Efisiensi= 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑛𝑔𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑥100%

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Langkah-langkahnya yaitu:

* + 1. Memasukan data biaya pemungutan pajak restoran dan pajak reklame dari tahun 2018-2023 ke dalam rumus.
		2. Masukan data realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak reklame tahun 2018-2023 ke dalam rumus.
		3. Menghitung biaya pemungutan pajak restoran dan pajak reklame dibagi dengan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak reklame menggunakan rumus efisiensi.
		4. Memasukan hasil perhitungan tingkat efisiensi penerimaan pajak restoran dan pajak reklame dari tahun 2018-2023.
		5. Menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil tingkat efisiensi.

# Tabel 3.1

**Kriteria Pengambil Keputusan Efisiensi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Presentase Kinerja Keuangan** | **Kriteria** |
| 100% keatas | Tidak Efisien |
| 90% - 100% | Kurang Efisien |
| 80% - 90% | Cukup Efisien |
| 60% - 80% | Efisien |
| Dibawah dari 60% | Sangat Efisien |

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

* 1. Analisis Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah

Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kontribusi dari pajak restoran dan pajak reklame pada pendapatan asli daerah, adapun rumusan dan langkah- langkah yang digunakan untuk menghitungnya.

Kontribusi=𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑥100%

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran dan pajak reklame pada PAD yaitu:

* + 1. Memasukan data realisasi penerimaan pajak tahun 2018-2023.
		2. Memasukan data penerimaan PAD 2018-2023 ke dalam rumus.
		3. Menghitung data realisasi penerimaan pajak dan data PAD ke dalam rumus kontribusi.
		4. Memasukan hasil hitungan kontribusi ke dalam tabel kontribusi pajak.
		5. Menganalisis dan menarik kesimpulan kontribusi pajak dengan cara membandingkan antara hasil perhitungan kontribusi dengan kriteria kontribusi, kriteria bisa dilihat dalam Tabel 3.1.
	1. Teknik Triangulasi

Teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data di perlukan pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan atas sejumlah kriteria tertentu untuk memperoleh jawaban penelitian yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan kebenaranya.

Triangulasi dalam pengujian kredibelitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data danTriangulasi pengumpulan data (Sugiyono, 2016).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu proses mengecek kembali data dan informasi yang di dapatkan melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh dari pegawai, staf, dokumen dan arsip dari Badan Keuangan Daerah Kota Tegal tentang literatur, karya ilmiah para ahli terdahulu, buku-buku, artikel, jurnal, internet, maupun data dan informasi yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dalam penelitian ini kemudian di cek dengan observasi dan dokumentasi sehingga dapat di temukan data yang valid dari penelitian ini.

1. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu yaitu proses pemeriksaan keabsahan data dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,

observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda- beda karena waktu juga sering mempengaruhi keabsahan data dalam penelitian.